



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IKHWAN HAMZAH
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN
3. NHK : 217990

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.475.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1162 m2/388 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 338 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 236 m2/70 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
6. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
7. Tanah Seluas 242 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 284 m2/72 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 890.597.000

1. MOTOR, SUZUKI SKYWAVE SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000



3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 2.500.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.5 G A/T Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 170.000.000
5. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000
6. MOTOR, YAMAHA FAZIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
19.935.000
7. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
443.762.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	237.845.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.439.185.210
F. HARTA LAINNYA	Rp.	12.333.000
Sub Total	Rp.	6.054.960.210
III. HUTANG	Rp.	50.409.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.004.551.210

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.